Suara Pembaruan
Senin, 5 Juni 2017

Perilaku Pemimpin Penyebab Persekusi

Rusak Citra Negara Hukum



ANTARA/PUSPA PERWITASARI

Presiden Joko Widodo (tengah) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berfoto bersama dengan tokoh-tokoh agama yang tergabung dalam Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama usai pertemuan di Istana Bogor, Jawa Barat, baru-baru ini. Presiden berpesan agar tokoh-tokoh agama di seluruh pelosok Indonesia menjadi garis depan dalam menjaga kerukunan, toleransi, persaudaraan, dan persatuan.

[JAKARTA] Prilaku pemimpin dinilai menjadi salah satu penyebab maraknya kasus persekusi belakangan ini. Pemimpin tidak memberikan contoh yang baik dalam menjalani kehidupan bertoleransi. Sebaliknya, para pemimpin baik pemimpin formal maupun informal justru berlomba untuk ingin menang sendiri.

"Fenomena persekusi belakangan ini marak karena contoh yang dipertontonkan para pemimpin kita yang formal maupun tidak formal, tidak memberikan contoh tentang toleransi tetapi ingin menang sendiri," kata pakar hukum Frans Hendra Winarta kepada *SP* di Jakarta, Senin (5/6).

Advokat senior ini menyatakan, persekusi merupakan perbuatan atau prilaku kasar yang disebabkan perbedaan agama. Untuk itu, tindakan persekusi dinilai bertentangan dengan falsafah Pancasila yang mengajarkan mengenai toleransi dan persamaan hak serta kesetaraan. Bahkan, jika diperas, intisari Pancasila merupakan kebersamaan dan persaudaraan.

"Persekusi ini menjurus kepada budaya kekerasan yang tidak bisa menerima perbedaan. Kalau lain dari kita dianggap salah. Segala yang berbeda dengan kita dianggap aneh. Sekali lagi toleransi adalah esensi falsafah Pancasila," ungkapnya.

Menurut Frans toleransi dalam kesetaraan, persaudaraan dan persatuan dalam perbedaan serta perbedaan dalam kesatuan merupakan esensi NKRI yang sebaiknya dirumuskan sebagai garis besar haluan negara. Namun, falsafah Pancasila saat ini belum dipraktekan secara konsekuen dalam kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara.

Untuk itu, Frans mendukung rencana pemerintah membentuk Unit Kerja Pembinaan Ideologi Pancasila. Unit kerja ini diharapkan dapat menopang penghayatan dan pedoman pelaksanaan sehari-hari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sementara itu, pakar hukum pidana dari Universitas Parahyangan Agustinus Pohan mengatakan, persekusi merupakan bentuk dari main hakim sendiri. Dikatakan, maraknya persekusi terjadi karena lembahnya penegak hukum. Sejumlah kelompok masyarakat telah mengambil alih peran yang seharusnya menjadi tanggung jawab penegak hukum. Mulai dari mengatur lalu lintas hingga kepada hal lain yang lebih serius.

"Untuk itu (persekusi) harus menjadi perhatian serius dari Polri. Saat ini harus menjadi momentum bagi penegak hukum untuk kembali mengendalikan sepenuhnya. Tentu tidak mudah, karena terkait dengan keterbatasan anggaran dan personil. Peran serta masyarakat tentu penting, namun tidak dengan mengambil alih kewenangan," katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi III Bambang Soesatyo mengatakan aksi persekusi adalah tindakan masyarakat sipil meruntuhkan kekuatan dan wibawa negara. Karena itu, negara tidak boleh menoleransi aksi-aksi seperti itu.

"Siapapun pelakunya dan sebesar apa pun kekuatan yang mendukungnya, negara wajib merespons aksi persekusi dengan sikap dan tindakan yang tegas, pun lugas," ujar Bambang di Jakarta, Minggu (4/6).

Jika aksi persekusi dan *sweeping* tidak segera dihentikan, kata Bambang, akan terbangun persepsi negatif di benak publik. [YUS/F-5]

Jokowi: Berlawanan dengan Hukum Negara

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa tindakan persekusi berlawanan dengan asas-asas hukum negara. "Sangat berlawanan dengan asas-asas hukum negara, jadi perorangan maupun kelompok-kelompok maupun organisasi apa pun tidak boleh main hakim sendiri, tidak boleh," kata Presiden Jokowi, usai acara Kajian Ramadan 1438 Hijriah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur yang digelar di Universitas Muhammadiyah Malang Dome, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Sabtu.

Apalagi, kata Presiden Jokowi, jika persekusi tersebut dilakukan mengatasnamakan penegakan hukum.

"Tidak ada, tidak boleh dan tidak ada. Kita bisa menjadi negara barbar kalau hal seperti ini dibiarkan," ujar Jokowi.

Presiden mengungkapkan bahwa dirinya sudah memerintahkan Kapolri untuk melakukan penegakan hukum dengan penindakan tegas terhadap praktik persekusi dan hal tersebut tidak boleh dibiarkan. [B1/H-12]